

Tajuk Rencana *Kedaulatan Rakyat*

Bola Sepenuhnya di Tangan Menpora

KEKHAWATIRAN itu menjadi kenyataan. FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI selama jangka waktu yang tidak ditentukan. Ini berarti PSSI tidak boleh melakukan aktivitas sepakbolaan di tanah air. Sekaligus tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan serupa di tingkat regional maupun internasional.

Inilah untuk pertama kalinya sejak menjadi anggota FIFA pada tahun 1950-an PSSI terkena sanksi FIFA. Selama ini ancaman akan jatuhnya sanksi itu dapat dihindarkan – termasuk ketika terjadi dualisme kepemimpinan PSSI. Namun nampaknya kali ini FIFA tidak dapat lagi menoleransi ketika pemerintah, dalam hal ini Menpora, dinilai melakukan intervensi. Menerbitkan SK pembekuan PSSI – suatu campur tangan yang terlalu jauh, sampai menohok ulu hati internal organisasi.

Keputusan telak FIFA itu sebenarnya dapat dihindarkan. Syaratnya, Menpora mencabut SK pembekuan aktivitas PSSI. Namun hingga batas waktu yang ditoleransi, SK tidak juga dicabut. Akhirnya jatuhnya sanksi yang sangat menyakitkan itu. Kompetisi sepakbolaan di tanah air dalam berbagai tingkatan dapat dipastikan menjadi terhenti.

Puluhan juta warga masyarakat bangsa kehilangan hiburan. Ribuan anak bangsa yang mengandalkan hidup dan penghidupan dari dunia sepakbola, kehilangan matapencarian. Mereka menjadi pengangguran. Belum lagi terhenti mereka

yang mengais rezeki dengan memanfaatkan ingar bingar setiap berlangsung pertandingan.

Sampai berapa lama sanksi FIFA akan berlangsung? Di balik kalimat 'hingga batas waktu yang tidak ditentukan' itu sebenarnya tersimpan satu kunci jawaban yang teramat sederhana. Yakni, sampai Menpora bersedia mencabut SK-nya. Begitu SK dicabut dan PSSI dapat segera menjalankan roda organisasi sesuai eksistensi, hak dan kewajibannya – dipastikan FIFA akan mencabut sanksi PSSI. Asumsi ini mengacu pada pengalaman federasi sepakbola Yunani dan Peru yang terkena sanksi FIFA hanya dalam hitungan hari.

Pertanyaannya, akankah Menpora mencabut SK-nya sehingga eksistensi, hak dan kewajiban PSSI dalam menjalankan roda organisasi pulih kembali? Nampaknya harapan itu jauh panggang dari api. Presiden Jokowi terkesan telah mengambil alih permasalahan pascatuhnya sanksi FIFA. Pimpinan tertinggi eksekutif ini menyatakan tekadnya untuk mereformasi, melakukan pembenahan total atas organisasi dan manajemen PSSI.

Bila pernyataan Presiden itu dijadikan pegangan, Menpora baru akan mencabut SK-nya setelah pembenahan total itu dianggap selesai. Dengan demikian 'campur tangan' pihak ketiga yang menjadi alasan utama jatuhnya sanksi FIFA, dimungkinkan akan berlangsung tanpa batas waktu. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah dunia sepakbolaan Indonesia menjadi mati suri. □ - k.

TANGGAL 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini kembali mencuat setelah lebih dari tiga dekade tergantikan oleh kesakralan Hari Kesaktian Pancasila. Tahun 2015 ini, Pancasila genap 70 tahun hadir dan melandasi jejak langkah hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Sepanjang sejarahnya, Pancasila telah berhasil melampaui segala macam tantangan dan penolakan. Pancasila tetap tegak bertahan. Tanda bahwa Pancasila bukan sekadar gagasan sesaat yang begitu abortif tatkala menghadapi berbagai benturan.

Pancasila lahir dalam kondisi serba sulit. Pancasila disepakati tidak serta merta namun melalui proses panjang dan perdebatan alot. Dari berbagai usulan yang disampaikan, Pancasila sebagaimana diusulkan Bung Karno, akhirnya diterima sebagai dasar negara. Lima sila ini diuraikan dengan sangat gamblang oleh Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Bung Karno dalam berbagai kesempatan menolak disebut sebagai pencipta Pancasila. Lima mutiara itu hanya digalinya dari perut Ibu Pertiwi yang sejak dulu sudah menjwai sendi-sendi hidup bermasyarakat. Menggali dapat dimaknai sebagai memahami sejarah utamanya aspek *mentifact* dan *sosiofact* yang melingkupi kehidupan manusia sejak peradaban Nusantara ada. Untuk menemukannya dibutuhkan penemuan jiwa yang mendalam dan tidak semua orang bisa melakukannya. Perjalanan ide dan inspirasi inilah yang diper-

Hendra Kurniawan

oleh Bung Karno di bawah pohon Sukun bercahaya lima di Teluk Ende, Flores.

Pancasila merupakan kerangka dasar kehidupan Bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa ini telah menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya pemersatu yang paling ideal. Ini artinya Pancasila bukan semata-mata menjadi dasar negara, namun juga pegangan hidup bangsa yang memberi petunjuk arah dan tuntunan bagi hidup bersama. Pancasila menyediakan tempat berpijak agar tidak terombang-ambing oleh berbagai pengaruh dan tekanan yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Naasnya di usia 70 tahun ini dan kendati telah membuktikan keampuhannya, Pancasila masih belum dihayati secara nyata.

Bermental Pancasila

Kelahiran Pancasila sebagai *grand narrative* yang orisinal milik bangsa Indonesia, ditambah pengalaman sejarahnya, selakannya memberi keyakinan tersendiri. Pancasila harus menjwai segala sendi kehidupan, termasuk dalam dinamika pemerintahan negeri ini. Mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sama dengan mencederai konsensus nasional. Bung Karno menegaskan bahwa tidak ada satu pun *weltanschauung* (dasar negara) yang dapat menjadi *realiteit* (kenyataan) jikalau tanpa perjuangan.

Di tengah pudarnya penghayatan terhadap Pancasila, Presiden Joko Widodo menggagas revolusi mental yang disambut begitu baik oleh segenap lapisan masyarakat. Revolusi mental

diyakini sebagai jawaban atas akutnya krisis yang melanda bangsa dewasa ini. Revolusi mental merupakan suatu paradigma baru dalam upaya *character building* sebagai gerakan signifikan guna mewujudkan *nation building*. Perseolannya sudah sejauh mana revolusi mental kita jalankan? Ataukah kini revolusi mental terancam mental (baca: terperalt)?

Sejatinya dekadensi moral yang melanda bangsa ini dapat dibenahi dengan kembali pada penghayatan yang sungguh terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Realitas sekarang ini keberadaan Pancasila tidak lebih hanya diingat sebagai simbol tanpa ada lagi kepedulian untuk mengamalkannya. Entah dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan sehari-hari yang terjadi kini adalah nihilisme nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan sinyal bagi kita semua untuk segera bergerak menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dicetuskannya revolusi mental bertalian erat dengan upaya untuk mendidik moral bangsa. Revolusi mental juga menjadi sarana untuk memperjuangkan tegaknya moral dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa merupakan sumber moral. Untuk itulah revolusi mental tidak hanya sekadar berbasis pada Pancasila, namun dalam pelaksanaannya pun harus dilandasi oleh kelima sila. Revolusi mental akan kehilangan arah jika tidak berpegang erat pada Pancasila. Akhirnya jikalau revolusi mental sebagai kesempatan emas untuk kembali seutuhnya pada Pancasila. □ - k.

**Yuli Andriansyah SE, Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII.*

Maksimum 600 Kata
PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Soal Gapura Khas Yogyakarta

BEBERAPA waktu lalu, melalui rubrik 'Pikiran Pembaca' KR, ada salah seorang pembaca mengusulkan perlunya pembuatan bangunan gapura khas Yogya. Diusulkan pula bila perlu diadakan lomba untuk membuat desain gapura yang menjadi ciri khas Yogya.

Membangun gapura khas Yogya memang perlu. Tidak hanya dibangun sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Kabupaten DIY. Tapi juga untuk pintu gerbang perkantoran dan juga hotel-hotel yang saat ini tumbuh subur di Yogya.

Bila kita memasuki wilayah provinsi lain, bangunan gapura yang khas itu sering kita lihat. Ketika kita memasuki wilayah Jawa Timur di pintu gerbang lorong desa dan kantor pemerintah hampir pasti kita lihat gapura khas Jawa Timur. Wujudnya meniru gerbang Majapahit (Candi Bajang Ratu di Trowulan) yang dibelah menjadi dua sisi (sisi kiri dan sisi kanan). Hal yang sama juga bisa kita lihat di Bali dengan khas gapura untuk bangunan pintu masuk pura. Dan masih banyak lagi di tempat-tempat lain.

Kita sesungguhnya tidak perlu merasa belum memiliki desain gapura khas Yogya. Sejak dulu sesungguhnya kita sudah punya. Orang dulu sering menyebut gapura tersebut dengan *cahrik* Elar Badak dan Semar Kinandu.

Teori dan Praktik Harus Seimbang

SAAT ini tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar mahasiswa yang sudah selesai mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (PT), belum bisa memberikan hasil positif terhadap lingkungan di mana mahasiswa itu selesai pendidikannya di perguruan tinggi tersebut. Hal ini tentu tidak memberikan hasil maksimal, karena hanya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Namun dengan seringnya penerapan PL ini, tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk memberikan hasil positif pada saat nantinya mahasiswa tersebut bekerja.

Dengan melihat dampak maupun manfaat dari penerapan Praktik Lapangan (PL) ini dapat menjadi referensi bagi para staf pengajar/dosen yang selama ini selalu fokus pada teori. □ - k.

Salah satu contohnya bisa kita lihat kalau kita akan memasuki Alun-alun Utara.

Pelaksanaan di lapangan, bila kita berjalan dari arah barat memasuki Kecamatan Temon, maka kita sudah bisa melihat bangunan gapura yang khas pada lorong-lorong yang akan masuk pedukuhan seperti *cahrik*. Walaupun bentuknya ada yang dimodifikasi disesuaikan dengan ketersediaan lahan.

Dari situ kita sudah bisa membedakan bahwa kita sudah meninggalkan wilayah Kabupaten Purworejo. Begitu pula ketika kita memasuki wilayah Prambanan Sleman dari arah timur atau dari Wonogiri masuk ke desa-desa di Gunungkidul.

Memang untuk di dalam Kota Yogya justru belum setiap kampung dibangun gapura semacam ini. Karenanya, bicara soal gapura yang khas Yogya tak ada salahnya bila nanti saat kita mempersiapkan HUT Proklamasi Kemerdekaan tahun 2015 diadakan lomba merias gapura khas Yogya pada pintu gerbang masuk kampung.

Permasalahannya sekarang adalah masih maukah kita *nguri-uri* warisan budaya yang memang sudah kita miliki atau ingin membuat bentuk baru biar terkesan lebih *ngetrend* dan modern. □ - k.

Kulup Bono DA, Pujokusuman Mg 1/443 Yogyakarta.

terti yang didapatkan di kampus.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memang sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap perguruan tinggi. PKL yang diterapkannya pun hanya sekali sampai dengan mahasiswa itu selesai pendidikannya di perguruan tinggi tersebut. Hal ini tentu tidak memberikan hasil maksimal, karena hanya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Namun dengan seringnya penerapan PL ini, tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk memberikan hasil positif pada saat nantinya mahasiswa tersebut bekerja.

Dengan melihat dampak maupun manfaat dari penerapan Praktik Lapangan (PL) ini dapat menjadi referensi bagi para staf pengajar/dosen yang selama ini selalu fokus pada teori. □ - k.

Olandik Karvallo Mahasiswa Jurusan Perpajakan Politeknik API Yogyakarta.

Pertemuan Pensiunan Perdagangan DIY

PERTEMUAN anggota Paguyuban Pensiunan Pegawai Perdagangan DIY untuk periode bulan Juni 2015 akan diadakan hari Rabu, 3 Juni 2015, pukul 10.00 WIB bertempat di

rumah Bapak H Drs Suharno, alamat Warungboto UH IV/936 telepon 380233 Yogyakarta. □ - k.

P Surono Atas Nama Pengurus.

BI Rate, Pertumbuhan dan Infrastruktur

BANK Indonesia akhirnya tetap matok BI Rate sebagai suku bunga acuan pada 7,50%. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan moneter yang cenderung ketat demi menjaga inflasi di kisaran 4% selama beberapa waktu ke depan (KRJogja.Com/19/05/2015).

Bagi dunia usaha, BI Rate pada kondisi ekonomi saat ini dirasa kurang kompetitif untuk menstimulus ekonomi nasional yang sedang lesu. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hanya 4,71% atau di bawah perkiraan BI di kisaran 5% dan pemerintah pun merevisi target pertumbuhan dari 5,7% menjadi 5,4% untuk tahun 2015. Dalam kondisi semacam ini, penurunan BI Rate sebenarnya sangat diharapkan untuk menggerakkan roda perekonomian.

Namun demikian, BI memang dalam posisi relatif sulit. Karena tekanan pelemahan pertumbuhan dalam negeri juga diikuti indikator makro internasional yang tidak kondusif. Tiongkok mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 7,0% atau turun dari 7,4%. Sejumlah negara *emerging markets* lainnya juga mengalami hal serupa yang menandakan *recovery* perekonomian dunia masih terus berjalan.

Sementara dari Amerika Serikat, bayang-bayang kenaikan suku bunga The Fed juga menjadi salah satu sentimen yang perlu dipertimbangkan. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada Juni atau September 2015 ini yang berpotensi membuat investor asing memindahkan dananya ke negeri Paman Sam tersebut.

Solusi yang umum digunakan bank sentral negara lain adalah menaikkan atau minimal menahan suku bunganya untuk menghindari *capital outflow*. Hal ini memang tidak berlaku bagi bank sentral Tiongkok yang justru memangkas suku bunga untuk menggenjot pertumbuhan. Namun bagi bank sentral negara berkembang seperti Indonesia, pilihan tidak menurunkan suku bunga dianggap lebih realistis.

Infrastruktur untuk Pertumbuhan

Mengingat suku bunga bank sentral sulit

Yuli Andriansyah

diandalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan, wajar jika pemerintahan Jokowi-JK disarankan lebih fokus pada proyek infrastruktur. Anggaran pemerintah untuk proyek infrastruktur dalam APBN-P 2015 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan nilai hampir mencapai Rp 300 triliun. Anggaran yang sebesar itu, tentu menjadi potensi untuk membangun sarana dan prasarana yang akan mengakselerasi pertumbuhan. Apalagi, pemerintahan Jokowi-JK memang menjadikan infrastruktur sebagai program unggulan selama kampanye maupun setelahnya.

Anggaran infrastruktur dan juga penanaman modal negara (PMN) yang besar pada masa pemerintahan ini tidak lepas dari kecenderungan penurunan harga minyak dunia. Persaingan industri minyak antara sejumlah negara utama dan kompetitornya menyebabkan harga minyak dunia turun. Momentum ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk memangkas subsidi bahan bakar dan menggantinya untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi-JK bahkan dianggap sebagian analisis sedang membawa Indonesia menuju capaian pembangunan Tiongkok yang pada dua hingga tiga dasawarsa lalu dimulai dari investasi besar-besaran di sektor infrastruktur.

Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek infrastruktur sendiri memang sudah nampak jelas. Selain sejumlah *roadshow* Presiden Jokowi di berbagai event internasional, komitmen di bidang hukum terkait infrastruktur juga telah dilakukan. Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un-

tuk Kepentingan Umum misalnya tengah disiapkan untuk menjamin proyek infrastruktur lebih mudah dieksekusi dan tidak terhalang masalah pembebasan lahan.

Namun demikian, satu hal tetap perlu dicatat dalam konteks infrastruktur, yaitu pembiayaannya yang berasal dari pajak. Dengan target pendapatan pajak mencapai Rp 1.489,3 triliun pada APBN-P, proyek infrastruktur akan sangat dipengaruhi realisasi penerimaan pajak. Sampai dengan kuartal I, baru 13,3% realisasi penerimaan pajak tercapai, jauh tertinggal dibandingkan capaian dua tahun anggaran sebelumnya.

Dari sini kemudian tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK muncul yaitu menggenjot penerimaan pajak dan mengawal proyek infrastruktur. Meskipun tidak mudah, pemerintah kali ini sebenarnya memiliki banyak momentum salah satunya berupa penyerapan anggaran yang relatif lebih baik dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Artinya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah selain bekerja lebih giat dan fokus agar pertumbuhan ekonomi di kuartal II lebih baik. Dan janji-janji peningkatan kualitas hidup rakyat dapat dipenuhi. □ - k.

**Yuli Andriansyah SE, Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII.*

Pojok KR
Pansel KPK minta masukan dari masyarakat.
- Masukan yang *bener tur pener*.

Novel Baswedan mengaku kecewa kinerja Polri.
- Ssst, jangan keras-keras...

Semn hari ini mulai pelunasan BPIH 2015.
- Jangan buang kesempatan emas!
Berabs

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Pensiatis: Drs HM Idham Samawi.
Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi.
Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Umum: HM Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS

Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Mussyahada, Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto. **Manajer Litbang Diklat Redaksi:** Wisnoko Poernomo, **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogo, Dra Esti Susilarti MPd, Yun Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Suswati, Dra Prabdanti, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyoto Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Isdiyanto SIP (Pjs Ka Biro Semarang), H Imong Dewanto (Pjs Ka Biro Jakarta), Qomarul Hadi (Ka Biro Surakarta), Edhi Romadhon (Ka Biro Purwokerto), Drs M Thoha (Ka Biro Kedu Utara), Gunarwan (Ka Biro Kedu Selatan), R Agusutata (Ka Sub Biro Kulonprogo), Sri Warsiti (Ka Sub Biro Klaten & Boyolali), Y Agus Waluyo (Ka Sub Biro Gunungkidul), Sukaryono BA (Pjs Waka Biro Semarang). **Fotografer:** Eddy Widjono Putro. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) ... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satuk Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ... Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman 1: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Bank: Bank BNI - Rek. Giro: 003.0440.854, Bank Bukopin - Rek. No. 100.0103.043, Dinas Giro dan Cekpos No.15.78
Diciptak di Percetakan "Kedaulatan Rakyat" Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, telp (0274) - 496459 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Kantor Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id>
Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com

Pewakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B Jakarta Timur 13120, telp (021) 85636902, fax: 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani, Wakil Kepala Perwakilan Hariyadi Tata Raharja, **Wartawan:** H Lelaq Zubaidi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, H Margono Herwoto, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga, **Kedu Utara:** Jalan Achmad Yani No. 13, telp (0293) 363552 dan 362502 Magelang. Kepala Perwakilan Sumiyarsih, **Surakarta:** Jalan Bhayangkara No.13 (lama no. 42) telp dan Fax (0271) 718015, Surakarta 57141. Kepala Perwakilan Dra Hermin Lestari, **Semarang:** Jalan Lampersi No. 62, telp (024) 8315792, 8448622, Pjs Kepala Perwakilan Fredo Kustanto, **Purwokerto:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, telp (0281) 622244, Fax (0281) 621797, Kepala Perwakilan Ach. Pujiyanto SPd. **Kedu Selatan:** Jalan Veteran Blok A Kav. 6 Purwokerto Plaza, telp/fax (0274) 321848. Kepala Perwakilan Suprpto SPd. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, telp 774738 Kepala Sub Perwakilan Suyatno, **Klaten & Boyolali:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3 Bendogantungan Klaten, telp (0272) 322756, Kepala Perwakilan Drs Guno Indarjo. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Telp 393562, 394707 Kepala Sub Perwakilan Grahibo. Homepage: www.kr.co.id.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.